

Jurnal

MIMBAR

Volume 2 No. 2 April - Juni 2013

ISSN: 2252 - 5270

Edi Darmawi, S.Sos., M.Si

Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkulu Utara

Dra. Faridah, M.Sis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Administrasi Umum Pemerintah Kota Bengkulu

Desita Rahayu, SIP., M.Si

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Pendataan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

Dr. Henny Apriyanti, S.Sos., M.Si

Analisis Kebijakan Pelaksanaan Penambangan Batu Bura dan dampaknya terhadap Lingkungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara)

Hernowo Novi Yanto, SE., M.Si

Meningkatkan Kinerja Pegawai dengan Pendekatan Mewirauahakan Organisasi (Suatu Studi di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu)

Dr. Drs. Adi Sutojo, M.Si

Analisis Program Aksi Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu

Drs. Muhammad Rozali

Kecenderungan Perilaku Pemilih (*Voters*) dalam Menentukan Pilihan pada Pemilihan Kota Bengkulu Tahun 2012

Alexsander, S.IP., M.Si

Pengaruh Ambiguitas Aparatur terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Terminal Karya Jaya

Drs. Bambang Sutikno, M.Si

Analisis Kinerja Pegawai dalam Memberikan Pelayanan (Studi Kasus di Kantor Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau)



Diterbitkan oleh:
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

JURNAL

MIMBAR

Volume 2 No. 2 April - Juni 2013

ISSN: 2252 - 5270

DAFTAR ISI

	Halaman
Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkulu Utara Edi Darmawi, S.Sos., M.Si	1 – 9
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Administrasi Umum Pemerintah Kota Bengkulu Dra. Faridah, M.Si	10 – 15
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Pendataan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Desita Rahayu, S.IP., M.Si	16 – 25
Analisis Kebijakan Pelaksanaan Penambangan Batu Bara dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara) Dr. Henny Apriyanti, S.Sos., M.Si	26 – 32
Meningkatkan Kinerja Pegawai dengan Pendekatan Mewirauahakan Organisasi Suatu Studi di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu) Bernowo Novi Yanto, SE., M.Si	33 – 40
Analisis Program Aksi Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu Dr. Drs. Adi Sutojo, M.Si	41 - 51
Kecenderungan Perilaku Pemilih (<i>Voters</i>) dalam Menentukan Pilihan pada Pemiluakada Kota Bengkulu Tahun 2012 Drs. Muhammad Rozali	52 – 58
Pengaruh Ambiguitas Aparatur Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Terminal Karya Jaya Palembang Alexsander, S.IP., M.Si	59 – 65
Analisis Kinerja Pegawai dalam Memberikan Pelayanan (Studi Kasus di Kantor Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau) Drs. Bambang Sutikno, M.Si	66 - 73

Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bengkulu Utara

Oleh:

Edi Darmawi, S.Sos., M.Si

Abstrak

Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bengkulu Utara

Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang ditinjau dari wilayah kerja di Disperindag Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di kabupaten Bengkulu Utara. Keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2010-2012 diamati dengan menggunakan teori Edward III (1980 : 10-11) yang mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut meliputi : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan metode purposive menurut pendapat Moleong, (2000) metode purposive menghendaki seorang peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key infoman) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Dalam metode yang digunakan untuk menganalisis dengan melihat empat tahapan tersebut terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara masih terhambat, hal ini dikarenakan antara lain : Belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan (bupati) dengan pelaksana di lapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola industri kecil dan menengah. Rendahnya kualitas pejabat dan staf Badan Perencanaan Daerah serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar menghambat evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan industri dan menengah dalam memberikan pelayanan publik. Hambatan ini juga ditambah dengan kurang tersedianya sarana kerja yaitu internet dan komputer untuk memberikan pelayanan secara on-line dan memberikan informasi kepada masyarakat luas secara cepat dan tepat. Sikap pejabat terkait cenderung mempertimbangan kepentingan politik daripada kemampuan dan profesionalitas. Selanjutnya, perubahan struktur birokrasi dan perubahan tugas pokok dan fungsi instansi menjadikan unit kerja kurang fokus dalam menjalankan kewenangannya.

Keywords: *Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.*

A. Pendahuluan

Struktur perekonomian Indonesia sebenarnya berbasis agraria, namun dalam perkembangannya telah bergeser atau mengalami perubahan menjadi negara yang basis perekonomiannya industri, khususnya industri manufaktur. Namun proses perkembangan perekonomian Indonesia telah mengalami stagnansi setelah krisis ekonomi yang melilit tajam.

Secara historis, industrialisasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada masa penjajahan Belanda, tepatnya setelah adanya sistem tanam paksa (*cultivation system*) pada 1830-an. Pada periode ini, sejumlah industri seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan rokok kretek telah ditemukan. Meskipun demikian, Pangestu dan Sato (1997:xi) berpendapat bahwa industrialisasi modern di Indonesia dimulai ketika presiden Soeharto berkuasa pada pertengahan 1960- an. Pemerintah Orde Baru

secara sengaja bermaksud merombak struktur ekonomi Indonesia, dari yang berbasis pada sektor pertanian ke yang berbasis pada sektor industri.

Usaha pemerintah Orde Baru memang tidak sia-sia, telah terjadi transformasi yang cukup besar struktur ekonomi Indonesia. Pada 1960-an misalnya, sumbangan sektor pertanian kepada GDP masih mencapai 53 persen. Pada awal 1990-an, sumbangan sektor pertanian kepada GDP turun menjadi 19 persen. Sebaliknya, sumbangan sektor industri manufaktur mengalami pelonjakan sampai tiga kali lipat, yakni dari hanya 8 persen mencapai 24 persen pada kurun waktu yang sama (Aswicahyono, 1997:2; Hill, 2000:5).

Kemunculan industri kecil menengah merupakan efek lain dari adanya industri-industri besar. Sampai tahun 2000-an, kelompok industri yang terkatagori mikro, kecil dan menengah tergolong yang paling besar di Indonesia. Industri kecil menengah muncul karena adanya sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia yang mendukung. Begitu pula dengan Industri kecil, menengah di Kabupaten Bengkulu Utara cenderung muncul karena adanya sumber daya alam yang dapat digali dan potensial.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bengkulu Utara merupakan motor penggerak dalam membina pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Bengkulu Utara. Beragam hasil karya industri kecil terus dipupuk agar berkembang demi menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat. Seperti usaha gula aren, pembuatan kerajinan kayu, dan kelompok pembuat kerupuk opak, masih banyak lagi jenis usaha kecil menengah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar dapat terus berkembang dan menopang kehidupan perekonomian rakyat Bengkulu Utara.

UKM harus memiliki Tanda Daftar Industri (TDI). Industri Kecil yang wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri) meliputi jenis industri yang tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/MIND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pengurusan TDI merupakan bagian dari tugas Bidang Industri pada Disperindag

Kabupaten Bengkulu Utara. Tidak semua pelaku UKM di Kabupaten Bengkulu Utara mengerti dan memahami pentingnya TDI bagi perkembangan usahanya, oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat judul “*Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Pada Tahun 2010-2012)*”.

B. Landasan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Pengkajian atau penganalisaan kebijakan dalam studi administrasi publik perlu kiranya meninjau pengertian kebijakan publik yang bermacam-macam pengertiannya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Wahab, 1997:2) :

“kebijakan publik diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Dalam maknanya seperti itu mungkin berupa deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana. Jadi istilah kebijaksanaan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya”

Maka tidak salah apabila Dye, (dalam Winarno, 2002:15) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Senada dengan definisi Dye, Easton, (dalam Islamy, 1997:19-20) menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat (“*The Autoritative Allocation of Values for the Whole Society*”).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002 : 101). Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka Van

Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002: 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai:

”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi tersebut”.

Edward III (1980 : 10-11) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel tadi meliputi *communication, resource, disposition and bureaucratic structure*.

1. Komunikasi

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas, agar bisa dilaksanakan dengan efektif. Dalam implementasi menurut Edward III (1980 : 10), komunikasi mempunyai peranan penting tidak hanya bagi para implementator, tapi juga bagi para *“policy maker”* karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, komunikasi harus jelas dan tegas, untuk menghindari kebingungan diantara para pelaksana sebagai akibat adanya kelonggaran dalam menafsirkan kebijakan-kebijakan tersebut. Ketetapan dan keakuratan informasi kebijakan menjadi tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dari satu implementasi kebijakan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu komunikasi dua arah sangat penting antara para pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Dengan demikian prospek implementasi yang efektif sangat ditentukan oleh kejelasan dengan mana standar dan tujuan ditetapkan dan dikomunikasikan dengan pelaksana secara konsisten dan akurat (*accuracy and consistency*).

2. Sumber Daya

Edward III (1980 : 10-11) mengemukakan faktor sumber daya ini mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta akuratnya komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya tidak tersedia untuk memperlancar implementasi kebijakan, maka suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan.

Sumber daya yang dimaksud antara lain mencakup, staff yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah dan anjuran atasan/pimpinan. Selain itu harus ada ketetapan atau kelayakan antara jumlah staff yang dibutuhkan. Keahlian yang dimiliki harus sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan, dana untuk membiayai implementasi tersebut, informasi yang relevan dan cukup tentang cara mengimplementasikan suatu kebijakan serta kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Kewenangan dan fasilitas juga penting dalam implementasi kebijakan sehingga hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan oleh Edward III (1980 : 11) sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementator) untuk melaksanakan kebijakan. Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka harus mempunyai kemauan dan keleluasaan karena kompleksnya kebijakan yang akan diimplementasikan.

Van Meter dan Van Horn, (1975 : 472) sedikit berbeda dalam mengomentari disposisi ini, selain variabel-variabel diatas, maka disposisi masih harus disaring (*be filtered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana, dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

4. Struktur Birokrasi

Ketidakefisienan struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*) menjadi faktor penting dan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, Edward III, (1980 : 11). Struktur

organisasi ini mencakup aspek-aspek seperti : struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi didalam organisasi itu sendiri dan hubungan antara organisasi dengan organisasi luar.

Empat faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tadi, saling berinteraksi satu sama lain dan berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan. Sedang pengaruh tidak langsung yaitu melalui dampak satu sama lain.

Berdasarkan definisi diatas maka implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, Gordon, 1986 (dalam Keban, 2004;72). Dalam hal ini menurut Keban (2004; 72-73) administrator mengatur cara mengorganisir, yaitu mengatur sumber daya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, guna merealisasi tujuan-tujuan program.

3. Industri Kecil dan Menengah

a. Industri Kecil

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Usaha Mikro sebagai usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari 4 orang. Sedangkan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). World Bank mendefinisikan Usaha Kecil atau Small Enterprise, dengan kriteria: Jumlah karyawan kurang dari 30 orang; Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta; Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta.

Namun demikian pengertian terbaru mengenai Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Usaha Menengah

Pengertian Usaha Menengah menurut Badan Pusat Statistik adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 orang hingga 99 orang. Sedangkan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

World Bank mendefinisikan Usaha Menengah atau Medium Enterprise adalah usaha dengan kriteria : Jumlah karyawan maksimal 300 orang; Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta; Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta Sedangkan pengertian Usaha Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta upiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Asumsi Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara

Keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2010-2012 diamati dengan menggunakan teori Edward III (1980 : 10-11) yang mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut meliputi :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi.

C. Metodologi Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini akan membahas keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi penelitian ini diadakan berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

Instrumen penelitian mengenai kajian karakteristik perilaku yang digambarkan dalam skema sebagai berikut :

1. Komunikasi
 - a. Kejelasan standar dan tujuan
 - b. Ketepatan dan keakuratan informasi.
 - c. Konsistensi.
2. Sumber Daya
 - a. Staff yang cukup dan mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas
 - b. Kecukupan dana
 - c. informasi yang relevan dan cukup
 - d. Kewenangan dan fasilitas
3. Disposisi
Kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementator) untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
 - a. struktur organisasi,
 - b. pembagian kewenangan,
 - c. hubungan antar unit-unit organisasi didalam organisasi itu sendiri dan hubungan antara organisasi dengan organisasi luar.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pengusaha kecil dan menengah dan pegawai Disperindag Kabupaten Bengkulu Utara. Sampel dalam penelitian ini selanjutnya akan disebut sebagai informan tidak ditentukan jumlahnya dan tidak menganut azas

representatif melalui sistem presentase dari populasi karena yang lebih dipentingkan adalah aspek kedalaman dan keluasan data. Oleh karena itu, penentuan informan menggunakan metode *purposive* menurut pendapat Moleong, (2000) metode *purposive* menghendaki seorang peneliti memilih informan yang dianggap tahu (*key infoman*) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik, dengan melakukan, wawancara, dokumentasi dan pengamatan 1) Observasi, 2) Dokumentasi/data sekunder, dan 3) Wawancara

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas : pertama, metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian secara independen. Kedua, metode interaktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dengan melihat empat tahapan tersebut terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data akan berputar antar item tanpa akhir, kecuali peneliti sudah merasa cukup untuk mengambil kesimpulan penelitian sebagai hasil analisis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendekatan Edwards III (1980) digunakan untuk mengkaji Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara. Edwards III (1980) menyebutkan bahwa suatu kebijakan sekalipun diimplementasikan dengan baik, namun bila tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan. Demikian juga apabila suatu kebijakan yang telah direncanakan sangat baik namun dalam implementasinya kurang baik, maka bisa saja kebijakan tersebut mengalami kegagalan.

Terdapat dua pertanyaan penting untuk mengkaji keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu prakondisi apa yang diperlukan oleh faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah di kabupaten Bengkulu Utara sehingga implementasi kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah dapat berhasil dan hambatan-hambatan utama apa yang

mengakibatkan suatu implementasi kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah mengalami kegagalan.

1. Mengkomunikasikan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, hal itu ditujukan agar setiap orang dapat mengetahuinya. Tindak lanjut setelah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah disusun adalah Bupati dengan kewenangan yang dimilikinya menyusun petunjuk pelaksana (juklak) menerjemahkan substansi Perda dalam bentuk keputusan dan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi pejabat dibawahnya yaitu para Kepala Dinas atau jabatan setingkatnya di bidang industri, pertanahan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja.

Koordinasi antar instansi terkait sangat penting dalam pengembangan industri kecil dan menengah. Hal pokok terlaksananya koordinasi yang baik adalah terjalannya komunikasi yang lancar antar instansi dan ini sangat ditentukan oleh pengertian yang luas dan mendalam bagi masing-masing pimpinan instansi dalam memahami kebijakan yang akan diimplementasikan. Selanjutnya peraturan daerah tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pemberitahuan melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, seperti siaran televisi, siaran radio, pemuatan koran, majalah, dan berbagai media kegiatan seni budaya.

Secara umum dalam pandangan Edwards III (1980) terdapat tiga faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, jelas, dan konsisten. Berikut akan dijelaskan ketiga faktor tersebut dalam implementasi kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pertama, terdapat beberapa hambatan dalam mentransmisikan implementasi kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah, yakni (1) pertentangan pendapat antara Bupati sebagai pejabat publik yang dipengaruhi oleh pandangan politik partai dan para pejabat dan staf instansi sebagai birokrat karier yang menjalankan administrasi negara; (2) perencana, penyusun, dan pelaksana, serta pengawasan kebijakan

pengembangan industri kecil dan menengah adalah para birokrasi yang bekerja sangat birokratis. Birokrasi mempunyai struktur hierarkis dalam rentang organisasi berlapis, sehingga setiap informasi yang disampaikan menjadi kurang efektif dan rentan terjadi distorsi substansi kebijakan; dan (3) sikap para pimpinan instansi terkait sebagai pelaksana lapangan yang mengabaikan apa yang sudah jelas dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui isi kebijakan tentang pengembangan kawasan industri dan tujuan yang diharapkan atas kebijakan tersebut.

Kedua, kebijakan pengembangan kawasan industri yang diterima oleh pimpinan instansi harus dikomunikasikan secara jelas dan terinci. Menurut Edwards III (1980), seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Apabila terjadi hal seperti ini, maka dapat mengakibatkan terhambatnya tujuan yang diharapkan dari implementasi kebijakan untuk mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Bengkulu Utara.

Ketiga, konsistensi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri yang diikuti dengan berbagai petunjuk pelaksanaan harus jelas dan konsisten dalam memberikan panduan bagi Kepala Dinas Perindustrian untuk menjalankan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Padahal dalam rangka mempercepat pengembangan industri kecil dan menengah, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri. Ketidacermatan menyusun landasan dasar Perda Nomor 19 Tahun 2004 sangat berpengaruh pada akselerasi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan industri kecil dan menengah. Selain itu, Perda yang disusun lemah pertimbangan hukum yang mendasarinya. Hal ini menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi Perda tersebut pada tahun 2009 sehingga kebijakan pengembangan kawasan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Suatu perintah kadangkala diabaikan oleh unit pelaksana apabila mereka tidak setuju dengan perintah itu apalagi apabila perintah tersebut merugikan bagian mereka atau mempermalukan pimpinan mereka. Diskresi atau keleluasaan muncul antara lain disebabkan perintah yang tidak spesifik

sehingga pejabat yang berada di setiap lapisan birokrasi dituntut bisa memperluas dan mengembangkan perintah tersebut. Proses ini menimbulkan distorsi baik dalam komunikasi kebijakan maupun implementasinya. Diskresi tersebut bisa dilakukan untuk lebih mendekati tujuan pembuat kebijakan atau sekedar mengakomodasi kepentingan pribadi atau unit pelaksana. Oleh sebab itu para eksekutif seperti presiden dan para pejabat tinggi di bawahnya sebaiknya memberikan perintah secara tertulis dan serinci mungkin, dengan menggunakan komunikasi personal yang tepat, dan menunjukkan kesungguhan dalam memberikan perintah yang akurat bagi para pelaksananya.

2. Sumber-Sumber (Recources) yang mendukung Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar merupakan instansi yang berwenang menjalankan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah. Kedua instansi tersebut dituntut untuk menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Kemampuan para staf mengelola administrasi negara yang melaksanakan dan menerjemahkan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah sangat menentukan dalam memberikan pelayanan publik kepada dunia usaha dan masyarakat.

Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah adalah terbatas atau sedikitnya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugasnya berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja bahkan banyak jabatan profesinya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Apalagi dengan berlakunya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pejabat pemerintah daerah untuk menetapkan promosi dan mutasi pegawai sesuai dengan kepentingannya bukan berdasarkan kecakapan atau keterampilannya.

3. Sikap (Dispositions) Staf Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Apabila para pejabat dan staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar telah mendukung kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka implementasi kebijakan yang dilaksanakan cenderung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana baik pejabat maupun staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar akan efektif apabila cara berpikir, sikap atau perspektif sama dengan Bupati dan Pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pihak yang menetapkan kebijakan. Kesamaan pandangan dan sikap tersebut sangat diperlukan dalam bagi keberhasilan usaha untuk mencapai tujuan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara. Kesamaan sikap ini juga harus ditunjukkan oleh instansi terkait lainnya seperti pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Penerangan, dan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) Pemerintah

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada dasarnya dilaksanakan oleh dua institusi yang terkait. Institusi yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Bengkulu Utara. Kedua institusi tersebut berbeda tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai masing-masing program kegiatan yang mempengaruhi efektivitas keberhasilan kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara menyelenggarakan manajemen pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan penilaian pelaksanaannya serta tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tugas pokok demikian menjadikan Bappeda sebagai lembaga yang sangat strategis bagi perencanaan semua program kegiatan berbagai kebijakan termasuk usaha Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar mempunyai visi terwujudnya industri yang tangguh untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Misinya adalah menjadikan sektor industri sebagai penggerak utama roda perekonomian melalui pembinaan dan pengembangan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Struktur birokrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar merupakan susunan organisasi tata kerja yang membawa tanggungjawab mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Bentuk organisasi tersebut diitata untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik dalam menjalankan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah.

Kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara dalam penguatan struktur industri di antaranya adalah mendorong terwujudnya peningkatan utilitas kapasitas, memperluas basis usaha dengan penyederhanaan prosedur perizinan, dan meningkatkan iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan ini tidak efektif sebab pengurusan izin masih dilaksanakan pada masing-masing instansi yang berbeda prosedur standar operasinya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat keberhasilan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Utara masih terhambat, hal ini dikarenakan antara lain :

1. Belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan (bupati) dengan pelaksana di lapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola industri kecil dan menengah.
2. Rendahnya kualitas pejabat dan staf Badan Perencanaan Daerah serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar menghambat evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan industri dan menengah dalam memberikan pelayanan publik.
3. Hambatan ini juga ditambah dengan kurang tersedianya sarana kerja yaitu internet dan komputer untuk memberikan pelayanan secara on-line dan memberikan informasi kepada masyarakat luas secara cepat dan tepat.
4. Sikap pejabat terkait cenderung mempertimbangan kepentingan politik

daripada kemampuan dan profesionalitas. Selanjutnya, perubahan struktur birokrasi dan perubahan tugas pokok dan fungsi instansi menjadikan unit kerja kurang fokus dalam menjalankan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Muhadjir, 2000, *Teori Administrasi*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R., 1972, *Understanding Public Policy*, Printice, Hall Inc, New Jersey.
- Edwards III, G.C., 1980, *Implementing Public Policy*, New York, Whashington DC, Congressional Quartely, Inc.
- Islami, Irfan, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Yeremias T, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Offset, Surabaya.
- Soenarko, 2000, *Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Thoha, Miftah, 2002, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Van Meter, Donal S, Van Horn, Carl E, 1975, *The Policy Implementation Process, A Conceptual Frame Work, Department of Political Science, OHIO State University*.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.